

ABSTRAK

Skripsi dengan judul “Peran Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Blitar dalam Pembangunan Kawasan Perdesaan Sebagai Upaya Sinergitas Potensi Agrominawisata Kecamatan Nglegok Kabupaten Blitar.” Ditulis oleh Umar Hasan Al Basir, NIM 17402153423 Pembimbing Muhamad Aqim Adlan, M.E.I.

Penelitian ini dilatarbelakangi masalah sosial ekonomi masyarakat di Kecamatan Nglegok. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) adalah unsur pelaksana urusan pemerintahan yang memiliki kewenangan dalam membangun Kawasan Perdesaan Agrominawisata. Adapun tujuan penelitian ini adalah: (1) Mendeskripsikan peran Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Blitar dalam pembangunan Kawasan Perdesaan Agrominawisata Kecamatan Nglegok Kabupaten Blitar. (2) Mendeskripsikan faktor pendukung dan penghambat Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) dalam pembangunan Kawasan Perdesaan Agrominawisata Kecamatan Nglegok Kabupaten Blitar.

Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif deskriptif. Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara, observasi, dan dokumentasi. Sumber data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Untuk keabsahan temuan menggunakan teknik triangulasi data.

Dari hasil analisis penelitian, dapat diketahui bahwa (1) Peran Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Blitar sebagai pemecah masalah : Muncul kepastian hukum pembangunan Agrominawisata, tersedianya anggaran untuk pendanaan Agrominawisata, dan terbentuknya kelembagaan pengurus Agrominawisata dan sebagai fasilitator : memfasilitasi berbagai pertemuan koordinasi dan rapat. (2) Faktor pendukung secara internal antara lain: adanya sumberdaya aparatur dengan spesifikasi khusus, adanya dokumen perencanaan, dukungan kerjasama tim di DPMD yang saling mendukung. Faktor pendukung secara eksternal antara lain: antusias pemerintah desa dan kecamatan, banyaknya potensi lokal, serta adanya dukungan teknologi informasi dan komunikasi. Sedangkan faktor penghambatnya secara internal yaitu antara lain: RPKP (Rencana Pengembangan Kawasan Perdesaan) yang dihasilkan TKPKP belum masuk Renstra (Rencana Strategis) masing-masing OPD (Organisasi Perangkat Daerah) para stakeholder, kurangnya koordinasi antar stakeholder, kurangnya dana khusus untuk kawasan perdesaan. Faktor penghambat secara eksternal antara lain: SDM dan sosialisasi kepada masyarakat yang masih kurang, dari sisi perencanaan pemerintah desa belum memasukkan isu kawasan perdesaan ke dalam RPJMDes (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa) maupun RKPDes (Rencana Kerja Pemerintah Desa), serta sarana dan prasarana kurang memadai.

Kata Kunci: Peran DPMD, pendukung, dan penghambat.

ABSTRACT

Thesis with the title "The Role of the Office of Community and Village Empowerment (DPMD) of Blitar Regency in the Development of Rural Areas as an Effort to Synergize Potential Agrominawisata Nglegok District of Blitar Regency." Written by Umar Hasan Al Basir, NIM 17402153423 Supervisor Muhamad Aqim Adlan, M..E.I.

This research is motivated by the socio-economic problems of the people in Nglegok District. The Community and Village Empowerment Office (DPMD) is an element of implementing government affairs that has the authority to develop Agrominawisata Rural Areas. The objectives of this study are: (1) Describe the role of the Blitar Regency Community and Village Empowerment Agency (DPMD) in the development of the Agrominawisata Rural Area Nglegok District, Blitar Regency. (2) Describe the supporting and inhibiting factors of the Office of Community and Village Empowerment (DPMD) in the development of Agrominawisata Rural Areas, Nglegok District, Blitar Regency.

The research method used is descriptive qualitative method. Data collection techniques using interviews, observation, and documentation. Data sources used are primary data and secondary data. For the validity of the findings using data triangulation techniques.

From the results of the research analysis, it can be seen that (1) The Role of the Blitar Regency Community Empowerment and Village Empowerment Agency (DPMD) as problem solver: Emerging legal certainty for Agrominawisata development, availability of budget for Agrominawisata funding, and the formation of Agrominawisata management institutions and as facilitators: facilitating various meetings coordination and meeting. (2) Internal supporting factors include: the availability of apparatus resources with special specifications, the existence of planning documents, the support of teamwork in DPMD which support each other. Supporting factors externally include: enthusiasm of village and sub-district governments, a lot of local potential, and the existence of information and communication technology support. While the inhibiting factors internally include: RPKP (Rural Area Development Plan) produced by TKPKP not yet included in the Strategic Plan of each Regional Government Organization (OPD) of stakeholders, lack of coordination among stakeholders, lack of special funds for rural areas. External inhibiting factors include: lack of human resources and outreach to the community, in terms of planning the village government has not included the issue of rural areas in the village medium term development plan (RJPDes) or RKPDes (village government work plan), as well as inadequate facilities and infrastructure adequate.

Keywords: Role of DPMD, supporters and inhibitors.